

Pengaruh PIP, BPJS PBI, dan UMK Terhadap Angka Kemiskinan di Jawa Timur

Mirda Lutfia Arini

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: mirda.21071@mhs.unesa.ac.id

Mohammad Wasil

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: mohammadwasil@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah sejauh mana Program Indonesia Pintar (PIP), kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 hingga 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, mencakup 38 kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun. Data yang dianalisis bersumber dari instansi resmi, di antaranya Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil pengolahan data dengan model Fixed Effect menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, secara terpisah, hanya variabel PIP dan UMK yang terbukti berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, sedangkan variabel BPJS belum memberikan dampak yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara pelaksanaan program BPJS perlu ditingkatkan agar dapat berkontribusi lebih optimal.

Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, PIP, BPJS, Data Panel, Jawa Timur

Abstract

This study aims to examine the extent to which the Indonesia Smart Program (Program Indonesia Pintar/PIP), the National Health Insurance (BPJS Kesehatan) for Contribution Assistance Recipients (PBI), and the Regency/City Minimum Wage (UMK) contribute to poverty levels in East Java Province during the period of 2019 to 2023. The research employs a quantitative approach using panel data regression analysis, covering 38 regencies/cities over a five-year observation period. The data used were sourced from official institutions such as Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) and the Ministry of Education and Culture. The analysis results, based on the Fixed Effect Model, indicate that these three independent variables jointly have a significant effect on poverty levels. However, when considered individually, only the PIP and UMK variables have a significant impact on reducing poverty, while the BPJS variable does not show a significant effect. These findings highlight that policies in the education and labor sectors are more effective in alleviating poverty, whereas the implementation of the BPJS program still requires improvements to enhance its effectiveness.

Keywords: Poverty, Indonesia Smart Program, BPJS, Minimum Wage, Panel Data, East Java.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah mendasar yang hingga saat ini terus menjadi tantangan signifikan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah Kemiskinan tidak semata-mata terkait dengan minimnya penghasilan, melainkan juga meliputi aspek akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, serta jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pemikiran *Adam Smith* dalam *The Wealth of Nations* menegaskan bahwa kesejahteraan suatu bangsa tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakatnya secara memadai, yang pada gilirannya dapat menunjukkan rendahnya tingkat kemiskinan di negara tersebut. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2023, persentase penduduk miskin mencapai 9,36 persen atau sekitar 25,9 juta jiwa. Walaupun angka tersebut menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kesenjangan tingkat kemiskinan antardaerah masih cukup mencolok. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa (BPS Jawa Timur) melaporkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih mencapai 4,18 juta jiwa, dengan tingkat sebaran yang bervariasi di setiap kabupaten/kota. Kondisi tersebut sejalan dengan *Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty)* dari (Nurske, 1953), yang menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi secara berulang akibat pendapatan yang rendah, tabungan yang terbatas, rendahnya investasi, dan produktivitas yang tidak optimal.

Rendahnya mutu pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) guna memberikan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera agar mereka tidak terancam putus sekolah. Berdasarkan *Teori Modal Manusia (Human Capital Theory)* yang dikembangkan oleh (Becker, 1964) dan (Grossman, n.d.) pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan keterampilan individu, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing di pasar tenaga kerja. (Michael P. Todaro, 2017) juga menekankan bahwa peningkatan akses pendidikan dapat menurunkan angka kemiskinan melalui terbukanya peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Selain pendidikan, aspek kesehatan juga memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dihadirkan pemerintah untuk meringankan beban biaya kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan *Teori Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)* dari (World Bank, 2001), jaminan sosial di bidang kesehatan membantu kelompok rentan dalam mengurangi risiko ekonomi yang dapat membuat mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan. *Teori Modal Manusia* pun mendukung pandangan bahwa jaminan kesehatan yang memadai akan meningkatkan produktivitas penduduk, menekan tingkat ketidakhadiran akibat penyakit, dan memperpanjang masa kerja yang produktif. Dalam hal tata kelola kebijakan publik, pendekatan *New Public Management (NPM)* (Osborne, D., & Gaebler, 1992) menekankan perlunya efisiensi, akuntabilitas, serta orientasi

pada hasil agar pelaksanaan program BPJS Kesehatan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Namun, di lapangan masih dijumpai berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kualitas layanan yang belum merata, hingga distribusi fasilitas kesehatan yang belum seimbang.

Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diterapkan untuk menjamin pendapatan minimum pekerja sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Kebijakan ini sejalan dengan konsep *Social Safety Net* di sektor ketenagakerjaan. Namun demikian, paradoks sering muncul ketika peningkatan UMK tidak diikuti oleh perluasan lapangan kerja, yang justru dapat memicu peningkatan pengangguran melalui terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Teori Dualisme Ekonomi* dari (Lewis, 1954) menjelaskan bahwa ketimpangan antara sektor tradisional yang padat karya berupah rendah dan sektor modern yang padat modal dapat memperlebar kesenjangan pendapatan jika kebijakan ketenagakerjaan tidak dijalankan secara tepat. Selain itu, *Capability Approach* dari (Sen, 1999) menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas individu melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan yang memadai agar masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan kehidupan yang mereka nilai bermakna.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga terkait keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan atau peluang (*opportunity deprivation*). Meskipun ketiga kebijakan tersebut telah diterapkan, temuan-temuan dari penelitian sebelumnya masih memperlihatkan hasil yang bervariasi. Penelitian (Maliangga et al., 2019) menunjukkan bahwa Program KIP (yang serupa dengan PIP) dan KIS (sejenis BPJS PBI) berkontribusi pada peningkatan konsumsi rumah tangga miskin sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Sebaliknya, (Febriani & Arif, 2023) menemukan bahwa implementasi Program PIP di Kabupaten Wonogiri tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan karena permasalahan ketepatan sasaran. Penelitian (Nadia Islami, 2019) menunjukkan bahwa kenaikan UMP/UMK tidak selalu berhasil menurunkan kemiskinan, bahkan dalam beberapa kasus justru meningkatkan pengangguran akibat PHK. Temuan berbeda disampaikan oleh (Permana & Pasaribu, 2023) yang mendapati bahwa kenaikan UMP dapat berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Sumatera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI), serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dinilai mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara objektif, terukur, dan dapat dibuktikan secara statistik.

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan karakteristik data panel, yaitu gabungan antara data lintas ruang (cross-section) dan data deret waktu (time-series). Unit cross-section mencakup 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, sedangkan periode waktu yang dianalisis meliputi lima tahun, yakni dari 2019 hingga 2023. Sumber data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta dokumen penetapan upah minimum yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Adapun model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Y_{it} = Angka kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

α = Konstanta

β_1 β_2 β_3 = Koefisien variabel independen

X_1 = Jumlah penerima PIP di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

X_2 = Jumlah penerima BPJS di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

X_3 = Jumlah UMP di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

ϵ_{it} = Error term

Alat yang digunakan dalam analisis data adalah program pengolahan data *E-views* 12. Model analisis yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih berdasarkan hasil Uji Chow dan Hausman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian Chow Test menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga model Fixed Effect Model (FEM) dinilai paling sesuai dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Selanjutnya, berdasarkan Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas yang juga sebesar $0,0000$, menandakan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan daripada *Random Effect Model*. Dengan demikian, hasil kedua uji ini konsisten menetapkan bahwa *Model Fixed Effect* dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat untuk analisis regresi.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Metode	Prob
Uji Chow	0.0000
Uji Hausman	0.0000

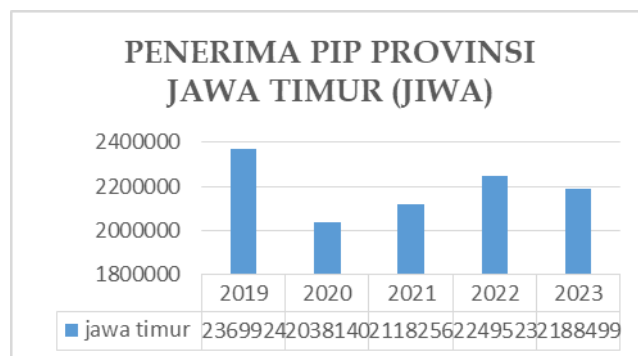
Sumber: Hasil Analisa, diolah 2024

Sebelum melanjutkan ke analisis regresi, uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menilai kesesuaian model. Dalam analisis regresi data panel, uji asumsi klasik memiliki peran yang krusial untuk menjamin hasil estimasi yang valid dan bebas dari bias. Sementara itu, uji lainnya seperti uji autokolerasi dan juga uji normalitas tidak diperlukan untuk data panel dikarenakan sifat data ini merupakan kombinasi antara elemen cross section dan time series. Alasan utama mengapa regresi data panel hanya memerlukan uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas ialah karakteristik unik dari data panel itu sendiri. Data panel mencakup berbagai individu dengan karakteristik yang berbeda, sehingga autokolerasi tidak menjadi isu utama. (Basuki & Prawoto, 2019) menjelaskan bahwa uji autokolerasi lebih relevan untuk diterapkan pada model time series murni, bukan pada regresi data panel. Pengujian multikolineritas dilakukan dengan meninjau nilai Variance Inflation Factor (VIF), yang dimana antar variabel X1 dan X2 memiliki nilai $-0,233949 < 0,80$, X1 dan X3 $0,219665 < 0,80$ dan yang terakhir ialah X2 dan X3 $-0,168788 < 0,80$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolineritas atau lolos Uji Multikolineritas. Yang kedua yaitu Uji Heteroskedastisitas X1 = 0.5916, X2 = 0.6852, dan X3 = 0.8978 yang dimana seluruhnya lebih besar dari 0.05 maka dari itu variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap ABS Residual dan dinyatakan tidak terkena Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil regresi Di antara ketiga variabel tersebut, dua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan dan satu variabel terbukti tidak berpengaruh dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya mengenai masing masing variabel tersebut.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	104.4066	9.176705	11.37735	0.0000
PIP (X1)	-0.000114	4.99	-2.294980	0.0231
BPJS (X2)	-0.140451	0.087628	-1602804	0.1111
UMK(X3)	8.36	4.22	1.979741	0.0496

Sumber: Hasil Analisa, diolah 2024

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel jumlah penerima beasiswa PIP (X1) terhadap angka kemiskinan (Y) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -2,294 dengan p-value sebesar 0,0231 dan koefisien beta sebesar -0,000114. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap penambahan satu orang penerima beasiswa PIP dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,000114 jiwa. Karena nilai p-value 0,0231 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima beasiswa PIP berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap angka kemiskinan. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang menerima beasiswa PIP maka tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung akan menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa PIP berfungsi sebagai salah satu bentuk intervensi sosial pemerintah di bidang pendidikan yang efektif membantu keluarga miskin dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, sehingga risiko putus sekolah dapat diminimalisir dan dalam jangka panjang turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penurunan kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan kerangka teori *Social Safety Net* yang menempatkan PIP sebagai mekanisme perlindungan sosial bagi kelompok rentan untuk menjamin keberlanjutan akses pendidikan. Selain itu, sesuai dengan *Human Capital Theory*, pemberian akses pendidikan melalui PIP diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta peluang kerja di masa depan yang pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam perspektif *Capability Approach* (Sen, 1999), PIP juga memperluas kapabilitas individu untuk memiliki kebebasan memilih dan menjalani kehidupan yang lebih layak dan bermakna. Temuan ini didukung oleh penelitian (Milyan, 2023), (Rakista, 2020), serta (Swandriano & Arif, 2023) yang menunjukkan bahwa implementasi PIP mampu mengurangi risiko putus sekolah, meningkatkan partisipasi pendidikan, dan berkontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Meski demikian, efektivitas PIP tetap perlu dioptimalkan melalui penyaluran yang lebih selektif agar manfaat program ini benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.



Gambar 1. Data Siswa Penerima PIP di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

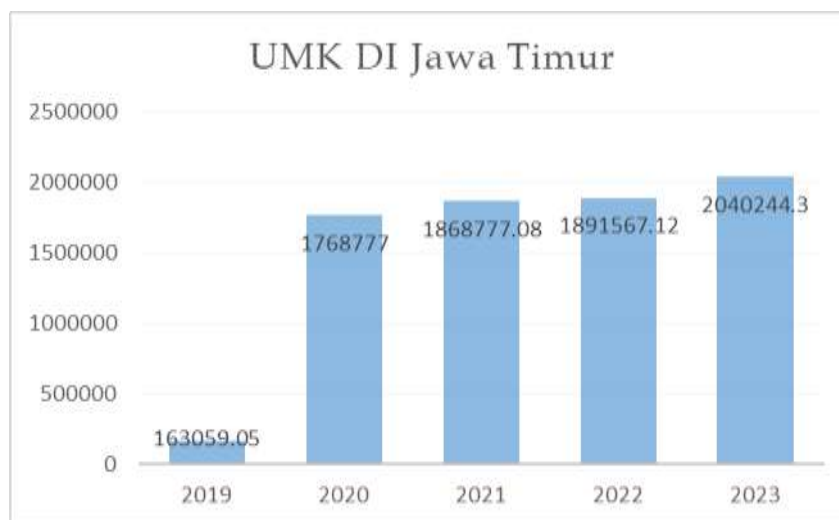
Terlihat pada Gambar 1 tabel jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren penurunan jumlah penerima di hampir seluruh wilayah di provinsi ini. Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang menjadi dua wilayah dengan penurunan jumlah penerima yang paling signifikan dibandingkan daerah lainnya, di mana pada tahun 2022 Kabupaten Jombang tercatat memiliki 14.452 penerima PIP dan menurun drastis menjadi 5.550 orang pada tahun 2023. Demikian pula, di Kabupaten Malang jumlah penerima PIP pada 2022 sebanyak 24.295 orang, kemudian menurun menjadi 15.389 orang pada 2023. Sementara itu, terdapat pula daerah yang justru menunjukkan tren peningkatan, seperti Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya. Kabupaten Pasuruan mencatat kenaikan jumlah penerima PIP yang cukup signifikan, dari 8.396 orang pada 2022 menjadi 12.119 orang pada 2023. Kota Surabaya juga mengalami peningkatan yang cukup mencolok, dari 12.459 penerima pada 2022 menjadi 17.385 orang pada 2023. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penerima Program PIP secara merata di sebagian besar wilayah Jawa Timur, meskipun di sisi lain masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan jumlah penerima secara konsisten.

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel penerima jaminan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar -1,602 dengan p-value sebesar 0,1111 dan koefisien beta sebesar -0,140. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koefisien beta bernilai negatif, p-value yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa jumlah penerima BPJS PBI tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Timur. Dengan kata lain, peningkatan jumlah peserta BPJS PBI belum mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil ini mencerminkan bahwa kepesertaan dalam jaminan kesehatan belum sepenuhnya efektif mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin secara langsung, terutama apabila kualitas pelayanan, kemudahan akses fasilitas kesehatan, dan pendampingan administrasi belum berjalan optimal. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menemukan bahwa meskipun permintaan layanan BPJS Kesehatan meningkat di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbatas karena manfaatnya lebih bersifat preventif daripada meningkatkan pendapatan secara langsung. Penelitian (Rakista, 2020) juga mendukung temuan

ini dengan menunjukkan bahwa walaupun BPJS PBI membantu mengurangi biaya kesehatan, pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga miskin belum signifikan apabila tidak diimbangi dengan perbaikan akses layanan dan penentuan peserta yang benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, agar BPJS PBI dapat berperan lebih optimal sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, diperlukan peningkatan mutu layanan kesehatan, penguatan literasi peserta untuk memanfaatkan haknya secara maksimal, serta integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (X3) menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1,979 dengan p-value sebesar 0,0496 dan koefisien beta senilai 8,36. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan UMK sebesar satu juta rupiah diperkirakan dapat meningkatkan angka kemiskinan sebanyak 8,36 jiwa. Karena p-value lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta positif, maka dapat disimpulkan bahwa UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, kenaikan UMK cenderung berkaitan dengan naiknya angka kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini dapat dijelaskan karena kenaikan UMK secara langsung menambah beban biaya tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Bagi pelaku usaha yang kesulitan menyesuaikan struktur biaya operasionalnya, kondisi ini dapat mendorong pengurangan karyawan dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengetatan rekrutmen tenaga kerja baru, yang pada akhirnya meningkatkan pengangguran dan berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Meskipun demikian, di sisi lain hasil ini juga menunjukkan bahwa kenaikan UMK secara tidak langsung mampu menaikkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah, sehingga daya beli mereka meningkat dan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, serta kesehatan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hal ini mendukung pandangan bahwa UMK berperan sebagai instrumen perlindungan pendapatan bagi pekerja formal beserta keluarganya, memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga, dan mengurangi ketergantungan pada utang. (Agustin et al., 2019) juga menegaskan bahwa UMK atau UMK memiliki arti penting bagi pekerja maupun pemerintah karena berkaitan erat dengan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini selaras dengan teori *The Vicious Cycle of Poverty* dari Nurske, yang menyatakan bahwa pendapatan yang lebih tinggi memberi kesempatan bagi rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi, sedangkan pendapatan yang rendah membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup, sehingga berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Penelitian (Ihsan & Ikhsan, 2018) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa upah dapat memacu motivasi dan produktivitas kerja serta menjadi sarana pemerataan pendapatan. Selain itu, (Tambunan, 2012) juga menyoroti peran penting UMK dalam menekan angka kemiskinan dengan mendukung peningkatan kesejahteraan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting melalui pengaturan regulasi mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga kepala daerah yang menetapkan UMK sesuai kondisi masing-masing daerah untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. Namun demikian, menurut (Atina & Setyowati, 2022), UMK

tidak selalu efektif dalam menurunkan kemiskinan karena masih banyak pelaku usaha yang belum menjalankan kebijakan UMK sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, kebijakan UMK perlu diiringi dengan pengawasan pelaksanaan di lapangan serta dukungan kebijakan untuk memperluas lapangan kerja, agar kenaikan upah tidak memicu dampak kontraproduktif terhadap penyerapan tenaga kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan.



Gambar 2. UMK Kab/Kota di Jawa Timur (Rupiah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama periode 2019 hingga 2023 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di beberapa kabupaten/kota. Kota Surabaya secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan nilai UMK tertinggi, di mana pada tahun 2023 besaran UMK Kota Surabaya mencapai Rp4.525.479,19, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan UMK ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dengan kemampuan perusahaan dalam membayar upah, yang juga mempertimbangkan faktor inflasi sebagai dasar penyesuaian. Sementara itu, Kabupaten Sampang tercatat sebagai daerah dengan nilai UMK terendah pada tahun 2023, yaitu hanya sebesar Rp2.114.335,27. Kondisi ini menggambarkan adanya tantangan ekonomi di wilayah tersebut, seperti keterbatasan infrastruktur, akses peluang ekonomi yang masih sempit, serta pemerataan akses pendidikan yang belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Program PIP terbukti efektif membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan layak dan berkualitas, sehingga akses pendidikan mereka semakin terbuka. Peningkatan akses pendidikan ini pada gilirannya mendorong produktivitas yang lebih tinggi serta memperluas peluang ekonomi, yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu, variabel jaminan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Program BPJS PBI masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait kelengkapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat-obatan, agar dapat benar-benar membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin secara langsung dan berfungsi maksimal sebagai jaring pengaman sosial di bidang kesehatan. Di sisi lain, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan, yang berarti bahwa kenaikan UMK secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kendati demikian, penerapan UMK perlu dilakukan secara konsisten di seluruh perusahaan agar kebijakan upah minimum ini benar-benar dapat melindungi hak pendapatan para pekerja secara adil serta mendukung penurunan angka kemiskinan secara nyata.

REFERENSI

- Agustin, N., Hidayat, M. S., & Umiyati, E. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 53–64. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i1.7346>
- Atina, N., & Setyowati, E. (2022). Determinan Tingkat Kemiskinan di Karesidenan Madiun Dengan Data Panel. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 89–99. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.9987>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 1–239.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Febriani, L. T., & Arif, M. (2023). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan, dan Program Indonesia Pintar dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 41–46.
- Grossman, M. (n.d.). The demand for health: A theoretical and empirical investigation. In 1972.
- Ihsan, K., & Ikhsan. (2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(3), 408–419. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/8950/0>
- Lewis, W. A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. 22(2), 139–191.
- Maliangga, M., Walewangko, E. N., & Londa, A. T. (2019). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kartu Indonesia Di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 32–43.
- Michael P. Todaro. (2017). Economic Development. In *Routledge Handbook of Marxian Economics*. <https://doi.org/10.4324/9781315774206-29>
- Milyan. (2023). Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 8(4).
- Nadia Islami, A. A. (2019). Pengaruh Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal GEEJ*, 1(2), 3.
- Nurske, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*.
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 38–51.
- Rakista, P. M. (2020). Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip).

- Kinerja*, 8(4), 224–232. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10097>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Swandriano, F. A., & Arif, M. (2023). Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 71. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i1.1401>
- Tambunan, T. (2012). Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 73–92. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.73-92>
- World Bank. (2001). *ocial Protection Sector Strategy: From Safety Net to Springboard*. The World Bank.